

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : SP DIPA- 065.01.1.670650/2025

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025

Revisi ke 06
Tanggal : 23 April 2025

B.Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- 2. Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
- 3. Provinsi : (01) DKI JAKARTA
- 4. Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
- Sebesar : Rp. 7.496.064.000 (TUJUH MILIAR EMPAT RATUS SEMBILAN PULUH ENAM JUTA ENAM PULUH EMPAT RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 04 EKONOMI
- 04.90 EKONOMI LAINNYA

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

Jumlah Uang

Terlampir

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	7.496.064.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB	Rp.		- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
- PNB TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN JAKARTA III (088) Rp. 7.496.064.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Jakarta, 02 Desember 2024
A.N. MENTERI KEUANGAN
PLH. DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

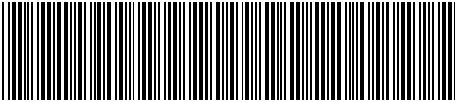
ttd.
SUAHASIL NAZARA
NIP. 197011231999031006

LAMPIRAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2025

NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025

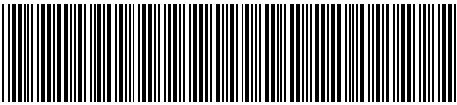


DS:7619-7775-8000-3228

Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	Rp.	7.496.064.000
ED.3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam	Rp.	2.000.000.000
ED.3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	Rp.	1.900.000.000
ED.3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	Rp.	1.350.000.000
ED.3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	Rp.	300.000.000
ED.5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	Rp.	364.810.000
ED.5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	Rp.	1.581.254.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
I A. INFORMASI KINERJA



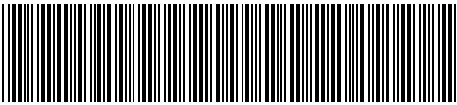
DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : I A. 1

Program	:	065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi				7.496.064.000	
Kegiatan	:	3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam				2.000.000.000	
Indikator Kinerja Kegiatan	:							
Klasifikasi Rincian Output	1	:	3231.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	550.000.000
Rincian Output	:	01	ABB.025	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Sumber Daya Alam		1.00	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000
			02	ABB.026	Penyusunan Dokumen RENCANA STRATEGIS BKPM 2025-2029	1.00	Rekomendasi Kebijakan	500.000.000
Klasifikasi Rincian Output	2	:	3231.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.000.000.000
Rincian Output	:	01	PBB.022	Investment Project Ready to Offer (IPRO) di Bidang Sumber Daya Alam		1.00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
					(PN)			
Klasifikasi Rincian Output	3	:	3231.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		3,00	Badan usaha, Miliar USD	450.000.000
Rincian Output	:	01	QDH.021	Percepatan Rencana proyek Strategis Sektor Sumber Daya Alam		3.00	Badan usaha	450.000.000
					(PN)			
Kegiatan	:	3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur				1.900.000.000	
	:							
Klasifikasi Rincian Output	4	:	3232.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	450.000.000
Rincian Output	:	01	ABB.025	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Manufaktur		1.00	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000
			02	ABB.026	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	1.00	Rekomendasi Kebijakan	400.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
I A. INFORMASI KINERJA

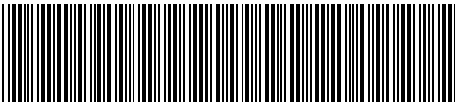


DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Klasifikasi Rincian Output	5	:	3232.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan			1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.000.000.000
Rincian Output		:	01	PBB.022	Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Industri Manufaktur	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	6	:	3232.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			3,00	Badan usaha, Miliar USD	450.000.000
Rincian Output		:	01	QDH.021	Percepatan Rencana Proyek di Bidang Industri Manufaktur	(PN)	3,00	Badan usaha	450.000.000
Kegiatan		:	3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan					1.350.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:							
Klasifikasi Rincian Output	7	:	3233.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan			1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	50.000.000
Rincian Output		:	01	ABB.025	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan		1,00	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000
Klasifikasi Rincian Output	8	:	3233.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan			1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	1.000.000.000
Rincian Output		:	01	PBB.021	Investment Project Ready to Offer (IPRO) bidang Jasa dan Kawasan	(PN)	1,00	Rekomendasi Kebijakan	1.000.000.000
Klasifikasi Rincian Output	9	:	3233.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha			2,00	Badan usaha, Miliar USD	300.000.000
Rincian Output		:	01	QDH.021	Percepatan Rencana Proyek Strategis di Bidang Jasa dan Kawasan	(PN)	2,00	Badan usaha	300.000.000
Kegiatan		:	3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)					300.000.000
		:							

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
I A. INFORMASI KINERJA



DS:7619-7775-8000-3228

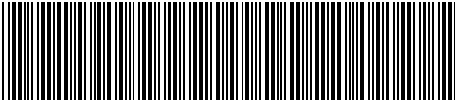
Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Klasifikasi Rincian Output	10	:	3234.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		2,00	Badan usaha, Miliar USD	300.000.000
Rincian Output		:	01	QDH.021	Percepatan Penyelesaian Masalah Strategis di KEK (PN)	2.00	Badan usaha	300.000.000
Kegiatan		:	5089		Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta			364.810.000
Indikator Kinerja Kegiatan		:						
Klasifikasi Rincian Output	11	:	5089.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		3,00	Badan usaha, Miliar USD	364.810.000
Rincian Output		:	01	QDH.021	Percepatan Rencana Penanaman Modal Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) (PN)	3.00	Badan usaha	364.810.000
Kegiatan		:	5265		Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur			1.581.254.000
		:						
Klasifikasi Rincian Output	12	:	5265.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		1,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	50.000.000
Rincian Output		:	01	ABB.024	Kajian Rencana Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	1.00	Rekomendasi Kebijakan	50.000.000
Klasifikasi Rincian Output	13	:	5265.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		2,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	931.254.000
Rincian Output		:	01	PBB.021	Investment Project Ready to Offer (IPRO) di bidang Infrastruktur (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	650.004.000
		:	02	PBB.022	Analisis Strategik Penanaman Modal Berbasis Infrastruktur (PN)	1.00	Rekomendasi Kebijakan	281.250.000
Klasifikasi Rincian Output	14	:	5265.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		3,00	Badan usaha, Miliar USD	600.000.000
Rincian Output		:	01	QDH.021	Percepatan rencana proyek penanaman modal di bidang infrastruktur (PN)	3.00	Badan usaha	600.000.000

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025



DS:7619-7775-8000-3228

I B. SUMBER DANA

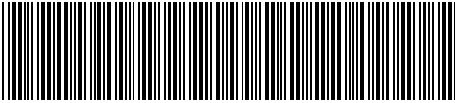
Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

			Pagu		Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2025	Rp.	7.496.064.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
1. Rupiah Murni	Rp.	7.496.064.000		(2) RPLN	US\$	0 Rp.
2. PNPB	Rp.			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0 Rp.
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0 Rp.
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
670650	KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL	-	7.496.064	-	-	-	7.496.064	01 . 54 088@ 01 . 54 088@ 01 . 54 088@	
065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi	-	7.496.064	-	-	-	7.496.064		
3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam	-	2.000.000	-	-	-	2.000.000		
3231.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	550.000	-	-	-	550.000		
01	RM	-	550.000	-	-	-	550.000		
3231.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000		
3231.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	450.000	-	-	-	450.000		
01	RM	-	450.000	-	-	-	450.000		
3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	-	1.900.000	-	-	-	1.900.000		

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3232.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	450.000	-	-	-	450.000	01 . 54	
01 RM		-	450.000	-	-	-	450.000	088@	
3232.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01 RM		-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	088@	
3232.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	450.000	-	-	-	450.000	01 . 54	
01 RM		-	450.000	-	-	-	450.000	088@	
3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	-	1.350.000	-	-	-	1.350.000		
3233.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	50.000	-	-	-	50.000	01 . 54	
01 RM		-	50.000	-	-	-	50.000	088@	

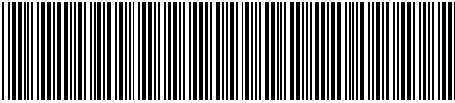
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3233.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	01 . 54	
01	RM	-	1.000.000	-	-	-	1.000.000	088@	
3233.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	300.000	-	-	-	300.000	01 . 54	
01	RM	-	300.000	-	-	-	300.000	088@	
3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	-	300.000	-	-	-	300.000		
3234.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	300.000	-	-	-	300.000	01 . 54	
01	RM	-	300.000	-	-	-	300.000	088@	
5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	-	364.810	-	-	-	364.810		
5089.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	364.810	-	-	-	364.810	01 . 54	
01	RM	-	364.810	-	-	-	364.810	088@	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL
Kewenangan : (KP)

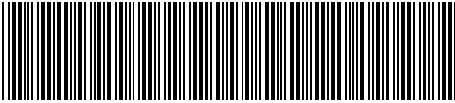
Halaman : II. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	-	1.581.254	-	-	-	1.581.254		
5265.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	50.000	-	-	-	50.000	01 . 54	
01 RM		-	50.000	-	-	-	50.000	088@	
5265.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	931.254	-	-	-	931.254	01 . 54	
01 RM		-	931.254	-	-	-	931.254	088@	
5265.QDH	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha (01.54 DKI JAKARTA / KOTA JAKARTA SELATAN)	-	600.000	-	-	-	600.000	01 . 54	
01 RM		-	600.000	-	-	-	600.000	088@	
JUMLAH		-	7.496.064	-	-	-	7.496.064		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN



DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : (065) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : (01) KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : (01) DKI JAKARTA
Kode>Nama Satker : (670650) KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

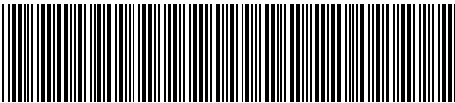
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	670650	KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	196.670	130.914	159.759	160.809	323.712	252.974	252.974	244.594	481.946	5.291.711	7.496.064
		BELANJA BARANG	0	0	196.670	130.914	159.759	160.809	323.712	252.974	252.974	244.594	481.946	5.291.711	7.496.064
	065.01.ED.3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam	0	0	25.757	47.708	47.708	47.707	99.887	99.887	99.887	99.887	99.887	1.331.685	2.000.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	25.757	47.708	47.708	47.707	99.887	99.887	99.887	99.887	99.887	1.331.685	2.000.000
	065.01.ED.3232	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur	0	0	82.939	17.505	17.505	17.505	96.328	96.328	96.328	96.328	96.328	1.282.906	1.900.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	82.939	17.505	17.505	17.505	96.328	96.328	96.328	96.328	96.328	1.282.906	1.900.000
	065.01.ED.3233	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan	0	0	27.506	14.952	43.797	43.794	83.925	13.187	13.187	4.807	242.159	862.685	1.350.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	27.506	14.952	43.797	43.794	83.925	13.187	13.187	4.807	242.159	862.685	1.350.000
	065.01.ED.3234	Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	0	0	0	11.305	11.305	11.305	0	0	0	0	0	266.085	300.000
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	11.305	11.305	11.305	0	0	0	0	0	266.085	300.000
	065.01.ED.5089	Fasilitasi Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta	0	0	0	16.908	16.908	16.908	0	0	0	0	0	314.086	364.810
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	0	16.908	16.908	16.908	0	0	0	0	0	314.086	364.810
	065.01.ED.5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur	0	0	60.468	22.536	22.536	23.590	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572	1.234.264	1.581.254
		52 BELANJA BARANG DAN JASA	0	0	60.468	22.536	22.536	23.590	43.572	43.572	43.572	43.572	43.572	1.234.264	1.581.254

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
IV A. B L O K I R



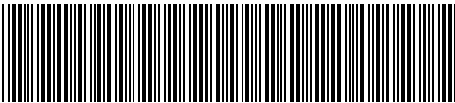
DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [670650] KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
670650	KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Jumlah Dana yang tidak dapat dicairkan Rp. 5.047.070	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	52 Belanja Barang Rp. 5.047.070	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
065.01.ED	Program Penanaman Modal dan Hilirisasi		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 111.562
3231	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sumber Daya Alam		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
3231.ABB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)	3231.PBB	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.035	521211	Belanja Bahan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.475
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.433	521213	Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 144.850
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
522131	Belanja Jasa Konsultan(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 41.000	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.412
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.200	522131	Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 318.427
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 10.965	522151	Belanja Jasa Profesi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.400
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.805	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.186

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
IV A. B L O K I R



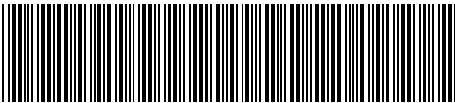
DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [670650] KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 2
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3231.QDH	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	3232.ABB	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.295		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 194.378
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal Sektor Industri Manufaktur
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 35.075		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.500
	Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.200		521211 Belanja Bahan(RM)
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 22.275
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 79.837		521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.500
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.668		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 2.591
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 93.307
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 102.496		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
IV A. B L O K I R



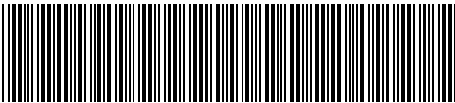
DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [670650] KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 3
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
3232.PBB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 38.400 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)	3232.QDH	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.000 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 36.232 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.046 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya 524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 53.445 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 69.738 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	521211 Belanja Bahan(RM)		521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 14.175 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.756 Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521213 Belanja Honor Output Kegiatan(RM)		521211 Belanja Bahan(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 189.200 Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.300 Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.006 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.937 Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 256.435 Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.200 Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025 Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		522191 Belanja Jasa Lainnya(RM)

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
IV A. B L O K I R



DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [670650] KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 4
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN		KODE	URAIAN	
3233.ABB		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.000		Disposisi: 521811	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 1.375
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 297.533		Disposisi: 522131	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 285.879
	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Jasa dan Kawasan			Disposisi: 522151	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Profesi(RM)
		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.500
	521211	Belanja Bahan(RM)		Disposisi: 524111	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 17.010			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 29.934
	Disposisi: 521811	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 7.490			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 26.027
	Disposisi: 524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 25.500			Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
	Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211	Belanja Bahan(RM)
	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan				Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.300
	521211	Belanja Bahan(RM)			Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.795		Disposisi: 521811	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Disposisi: 521213	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan(RM)			Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.649
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.800			Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	

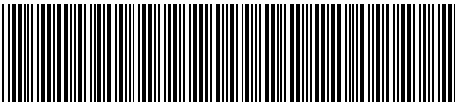
00000000000000000000000000000000

Kementerian Negara/Lembaga	: [065]	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi	: [01]	KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi	: [01]	DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker	: [670650]	KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 5
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN			KODE	URAIAN		
3234 3234.QDH	Disposisi: 522151	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 82.000	5089 5089.QDH	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		
	Disposisi: 524111	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 52.680		Disposisi: 524111	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 42.732
	Disposisi: 524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 6.800		Disposisi: 524113	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 1.700
	Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 119.138		Disposisi: 524119	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 193.388
	Disposisi: 3234 Pengembangan Penanaman Modal Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)				Disposisi: 5089 Fasilitas Percepatan Investasi Kerja Sama Pemerintah Swasta		
	Disposisi: 3234.Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha				Disposisi: 5089.Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha		
	Disposisi: 521211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 7.290		Disposisi: 521115	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Honor Operasional Satuan Kerja(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 88.296
	Disposisi: 521811	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 3.175		Disposisi: 521211	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Bahan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 69.480
	Disposisi: 522151	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Jasa Profesi(RM) Tidak Dapat Dicairkan	Rp. 17.800		Disposisi: 521213	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Honor Output Kegiatan(RM) Tidak Dapat Dicairkan Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025	Rp. 3.200
					Disposisi: 521811	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)	

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
IV A. B L O K I R



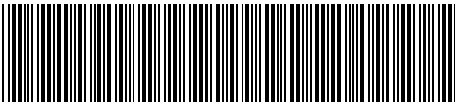
DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [670650] KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.A. 6
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
5265.ABB	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 8.195	5265.PBB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.460
	522151 Belanja Jasa Profesi(RM)		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.000		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 6.800
	524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 49.579		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521211 Belanja Bahan(RM)
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 42.690
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 15.300		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)
5265	Perencanaan Pengembangan Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 9.982
	Kebijakan Bidang Investasi dan Perdagangan		Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521119 Belanja Barang Operasional Lainnya(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 12.340		522131 Belanja Jasa Konsultan(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 150.000
5265.ABB	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya	5265.ABB	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	521211 Belanja Bahan(RM)		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 24.300		522151 Belanja Jasa Profesi(RM)
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.400

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
IV A. B L O K I R



DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [670650] KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

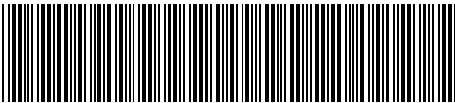
Halaman : IV.A. 7
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN
5265.QDH	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota(RM)		524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 5.100		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 70.860
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota(RM)		524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 34.018		Tidak Dapat Dicairkan Rp. 303.989
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya
	524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 240.909		
	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Disposisi: Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
	Fasilitas dan Pembinaan Badan Usaha		
521211	Belanja Bahan(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 20.940		
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 3.376		
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
522151	Belanja Jasa Profesi(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 13.600		
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		
Disposisi:	Kebijakan Penyesuaian Belanja Negara dan Kebijakan Pemerintah Lainnya		
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa(RM)		
	Tidak Dapat Dicairkan Rp. 122.730		
	Instruksi Presiden No.1 Tahun 2025		

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : DIPA- 065.01.1.670650/2025
IV B. C A T A T A N



DS:7619-7775-8000-3228

Kementerian Negara/Lembaga : [065] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI / BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Unit Organisasi : [01] KEMENTERIAN INVESTASI DAN HILIRISASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Provinsi : [01] DKI JAKARTA
Kode dan Nama Satker : [670650] KANTOR DEPUTI BIDANG PERENCANAAN PENANAMAN MODAL

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 02 Desember 2024
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM

ttd.
Rosan Perkasa Roeslani
NIP. 3174053112680002